

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain Rencana Kerja Tahun 2024, dalam dokumen Renja ini juga dijelaskan hasil atau capaian kinerja serta evaluasi kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022 dan evaluasi Tahun 2023 atau tahun berjalan dari triwulan I sampai triwulan II.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 disusun sebagai arahan pelaksanaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai tupoksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Semoga Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai bahan perencanaan pembangunan terutama di bidang perikanan di Kabupaten Natuna pada masa sekarang dan yang akan datang.

Ranai, Agustus 2023

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA



HADI SURYANTO, S.Pi, M.Si
NIP. 19730106 200012 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023	27
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	27
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..	28
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024	29
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	33
BAB V. PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel II.1.	Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2022	8
Tabel II.2.	Capaian Kinerja Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022	8
Tabel II.3.	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2022	9
Tabel II.4.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022	10
Tabel II.5.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 Triwulan I dan II	15
Tabel II.6.	Rincian Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Perikanan Tahun 2022	19
Tabel III.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024	29
Tabel IV.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dari penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan tujuan organisasi serta cara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perencanaan bukanlah sesuatu yang statis akan tetapi lebih bersifat dinamis dan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga merupakan suatu siklus berkelanjutan yang akan mendasari semua organisasi utamanya dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Menindaklanjuti perkembangan dinamika kehidupan masyarakat serta potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Natuna, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, telah disiapkan dan disusun rencana kerja (Renja) guna mendukung dan mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Natuna. Penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan bentuk konkrit yang akan menjadi arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan perencanaan tahunan dari Organisasi Perangkat daerah

yang bersangkutan. Sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan ini merupakan dokumen yang akan mengarahkan pelayanan dan pembangunan daerah di bidang perikanan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan serta akan menjawab 3 pertanyaan dasar yaitu: (1) kemana pelayanan Dinas Perikanan akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai di tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sudah dijelaskan tentang kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Jika mengacu pada aturan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- c. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
- d. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan
- e. Pengelolaan pembudidayaan ikan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perikanan;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perikanan;
3. Penyelenggaraan Pembinaan, Penyuluhan dan Bimbingan Usaha Perikanan dari Hulu sampai Hilir; dan
4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Dalam Batas Kewenangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 65);

13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 103 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 103).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2023 sebagai berikut:

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2023.

2. Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Sebagai gambaran mengenai perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan pada Tahun 2023;
- b. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja program dan kegiatan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- c. Sebagai bahan acuan dalam rangka penyusunan/perencanaan program dan kegiatan pembangunan serta upaya peningkatan kinerja instansi Pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan,** berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,** berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;** berisi tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; Program dan Kegiatan Tahun 2023.
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;** berisi tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perikanan Tahun 2023
- Bab V : Penutup,** berisi tentang Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perikanan Natuna adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2021 telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 2 (dua) tujuan yang tercakup dalam 3 (tiga) program yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Perikanan. Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2022 terdapat 3 (tiga) program yang mendukung kinerja utama, yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Untuk mencapai target kinerja Tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna melakukan berbagai upaya agar target kinerja terealisasi dengan baik. Selain anggaran yang tersedia, ada beberapa upaya yang dilakukan yaitu adanya kerjasama antara pemerintah, pihak swasta, masyarakat, Koordinator Lapangan, dan Penyuluh Perikanan Bantu serta didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar) hasil perikanan. Pembentukan kelembagaan atau kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan turut mendukung tercapainya realisasi tersebut.

Capaian kinerja yang mendukung indikator kinerja utama Dinas Perikanan yang dievaluasi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.1.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TAHUN
2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan	Ton	138.587,41	139.138,66	100,40
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	418,90	526,29	125,64

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi, dimana capaian persentase produksi perikanan sebesar 100,40% dan persentase produksi olahan produk perikanan mencapai 125,64%. Jumlah produksi perikanan merupakan penjumlahan dari jumlah produksi perikanan tangkap dan jumlah produksi perikanan budidaya, sedangkan Jumlah produksi olahan produk perikanan merupakan jumlah produksi olahan yang di produksi oleh unit pengolahan ikan atau pokhlasar yang ada di Kabupaten Natuna. Nilai produksi tersebut merupakan laporan produksi dari bidang yang diperoleh dari koordinator lapangan Dinas Perikanan yang ada di kecamatan. Secara detail jumlah produksi perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.2.
CAPAIAN KINERJA JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP,
JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA DAN JUMLAH
PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN
TAHUN 2022

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	134.481,33	134,874.54	100,29
2.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.106,08	4.264,11	103,85
3.	Jumlah Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	418,90	526,29	125,64

Selain melihat tingkat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan, pengukuran atau capaian kinerja Dinas Perikanan juga

diukur dengan membandingkan realisasi pada Tahun 2021 dengan realisasi Tahun 2022. Perbandingan realisasi ini diharapkan dapat melihat peningkatan jumlah produksi perikanan yang telah dicapai, sehingga dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk meningkatkan produksi perikanan ditahun-tahun selanjutnya. Nilai produksi yang disajikan pada **Tabel.II.2.** diatas diperoleh dari tiap-tiap bidang yang membidangi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana nilai tersebut merupakan rekapan data produksi Tahun 2022 yang diperoleh dari tiap-tiap kecamatan. Dibawah ini dapat dilihat perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

TABEL II.3.
PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN TAHUN 2021 – 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2021	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan	Ton	136.678,02	139.138,66
		Produksi Olahan Produk Perikanan	Ton	410,69	526,29

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna menargetkan jumlah produksi perikanan pada Tahun 2022 adalah sebesar 136.678,02 Ton, dimana angka tersebut merupakan target dari jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 134.481,33 Ton dan target jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 4.106,68 Ton. Pada Tahun 2022 capaian jumlah produksi perikanan telah melebihi dari target yang ditetapkan. Dimana perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan dapat dilihat pada tabel diatas. Selain dari jumlah produksi perikanan, tabel diatas juga menjelaskan perbandingan antara target dan realisasi produksi olahan produk perikanan dimana realisasi produksi olahan produk perikanan sebesar 526,29 Ton dan telah melebihi target pada Tahun 2022.

TABEL II.4.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021	Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah										
					5	6		7	8	9	10	11																
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7	14=6+12	15=14/5x1	16												
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariat an yang sesuai SOP	Persaan	90	41.461.448,685	80	80	8.292.209,617	80	12.262.961,388	72	1.547.888,930	72	1.531.531,207	72	1.547.390,574	72	1.731.905,993	288	6.398.636,724	360	52	368	6.398.636,724	409	15	Dinas Perikanan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/Nilai Akuntabilitas	81	500.000,000	75,67	76	100.000,000	76	56.340,200	0	0	80,71	7.868,054	-	1.408,503	0	10.434,404	81	19.710,961	108	35	156	19.710,961	193	4	Dinas Perikanan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	500.000,000	2	2	100.000,000	2	56.340,200	0	0	2	7.868,054	0	1.408,503	0	10.434,404	2	19.710,961	108	35	4	19.710,961	33	4	Dinas Perikanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	27.431.311,585	1	1	5.394.614,317	1	4.453.734,016	1	1.178.068,761	1	1.097.793,084	1	1.329.086,398	1	1.379.862,094	4	4.985.410,937	400	112	5	4.985.410,937	508	18	Dinas Perikanan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	27.431.311,585	40	48	5.394.614,317	48	4.453.734,016	40	1.178.068,761	41	1.097.793,084	41	1.329.086,398	41	1.379.862,094	162	4.985.410,937	340	112	203	4.985.410,937	338	18	Dinas Perikanan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persaan	90	4.294.139,600	75	77	1.841.764,608	75	1.078.234,210	66,43	134.882,725	83,36	165.149,088	83,33	212.510,245	94,17	373.410,305	327	895.952,363	426	82	402	895.952,363	447	21	Dinas Perikanan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	1.080.404,110	10	7	604.404,110	8	383.973,000	0	0	2	10.876,000	0	79.076,135	3	116.046,000	5	209.196,135	83	54	15	209.196,135	80	19	Dinas Perikanan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	44.180,400	0	1	44.180,400	1	26.786,400	1	5.300,000	1	5.908,000	1	3.627,000	1	9.567,000	4	24.298,000	400	81	4	24.298,000	400	51	Dinas Perikanan
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	22.000,000	0	1	22.000,000	1	11.000,000	1	432,000	1	3.150,000	1	480,000	1	4.224,000	4	8.288,000	400	75	4	8.288,000	400	38	Dinas Perikanan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	306.772,000	1	2	51.200,000	2	31.200,000	2	9.701,100	2	9.261,100	2	9.417,500	2	17.940,200	8	43.352,300	400	139	9	43.352,300	450	14	Dinas Perikanan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	50	125.800,000	10	10	25.000,000	10	27.850,000	4	0	12	3.900,000	9	2.000,000	7	7.850,000	12	13.800,000	320	50	42	13.800,000	84	11	Dinas Perikanan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/ Bidang Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah									
					1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9						10	11	12=8+9+10+11	13=12/7	14=6+12	15=14/5x1	16		
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	Paket	1	95.000.000	1	1	95.000.000	1	78.300.000	1	11.999.000	1	18.129.000	1	16.930.000	1	28.857.000	2	76.904.000	400	98	9	76.904.000	500	81	Dinas Perikanan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	80	2.630.000.000	60	80	700.000.000	120	519.124.780	30	107.451.625	15	112.851.388	37	103.479.156	7	186.331.105	153	510.113.874	127	98	212	510.113.874	265	19	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	80	3.817.684.189	75	76	946.775.388	88	851.274.000	47,00	192.549.957	63,16	285.114.457	79,82	204.382.827	96,49	236.388.087	288	838.427.328	358	98	361	838.427.328	452	21	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	121.800.000	0	12	14.400.000	12	16.261.000	3	2.988.000	3	3.012.000	3	3.115.000	3	3.826.000	12	13.041.000	100	80	12	13.041.000	100	11	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	318.000.000	12	12	298.000.000	12	239.513.000	3	36.000	3	12.576.500	3	6.860.000	3	42.099.500	12	61.572.000	100	76	24	61.572.000	200	19	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40	3.478.854.100	38	38	693.385.300	38	595.500.000	35	189.525.957	34	189.525.957	34	194.407.827	34	190.354.587	137	763.814.328	361	123	170	763.814.328	438	22	Dinas Perikanan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persentase	80	1.982.270.888	75	76	311.135.488	85	265.164.042	97,00	41.797.547	97,44	55.605.924	97,44	52.512.846	97,44	105.229.388	288	255.055.685	458	96	464	255.055.685	588	13	Dinas Perikanan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	991.135.400	38	39	231.135.400	39	216.289.042	37	30.032.547	37	47.825.924	37	46.272.846	7	90.074.388	140	214.205.685	270	99	186	214.205.685	460	22	Dinas Perikanan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	40	991.135.400	2	2	80.000.000	2	48.875.000	2	11.075.000	2	7.780.000	2	8.240.000	8	15.155.000	8	40.850.000	400	84	10	40.850.000	20	8	Dinas Perikanan
	Meningkatkan Ekonomi Sektor	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persentase	4.83	7.500.000.000	9.99	1.39	1.200.000.000	1.39	3.027.732.515	2.42	34.674.333	3.34	32.671.000	3.05	1.256.717.659	1.89	96.289.564	10.51	1.420.352.947	758	47	28	1.420.352.947	448	19	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	138.886.88	3.550.000.000	132.632.62	134.481.33	590.000.000	134.481.33	1.612.493.000	26.874.54	14.051.340	39.328.59	21.742.000	37.885.45	1.256.717.659	30.785.96	96.289.564	13427454	1.388.800.554	189	86	267.507	1.388.800.554	193	39	Dinas Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Jenis	3	3.550.000.000	4	5	500.000.000	3	1.612.493.000	0	14.051.340	0	21.742.000	3	1.256.717.659	0	96.289.564	3	1.388.800.554	100	86	7	1.388.800.554	233	39	Dinas Perikanan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah								
									I	II	III	IV																	
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7	14=6+12	15=14/5x1	16													
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	Persentase Fasilitas Kapasitas	Person	22.18	3.950.000.000	37.78		11.57	700.000.000	75.00	1.415.239.315	0	20.622.993	0	10.929.000	0	4	31.551.993	6	2	42	31.551.993	189	1	Dinas Perikanan			
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	170	2.275.000.000	135		30	425.000.000	170	1.137.768.020	0	20.622.993	0	10.929.000	0	0	31.551.993	0	3	135	31.551.993	79	1	Dinas Perikanan			
		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelambagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelambagaannya	kelompok	115	1.675.000.000	160		20	275.000.000	17	277.471.295	0	0	0	0	0	20	0	20	0	119	0	180	0	157	0	Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Person	7.14	4.987.581.422	8.53	-	1.5	1.113.790.711	1.5	1.523.241.295	22.59	20.715.537	-3.58	68.391.351	29.89	357.941.304	5.41	700.698.585	54	1,147,746,777	3.578	75	82	1,147,746,777	889	23	Dinas Perikanan
		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbiasa	Kelompok	93	2.736.000.000	10	-	14	251.000.000	10	252.591.695	0	0	4	7.973.112	10	5.979.834	11	0	25	13.952.948	250	6	35	13.952.948	38	1	Dinas Perikanan
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbiasa	Kelompok	39	2.736.000.000	44	-	10	251.000.000	10	252.591.695	0	0	4	7.973.112	10	5.979.834	11	0	25	13.952.948	250	6	68	13.952.948	177	1	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	4.342.72	2.231.581.422	4.045.40	-	4.106.08	862.790.711	4.106.08	1.270.649.600	476.11	20.715.537	1.416.75	60.418.239	1.607.79	351.961.470	763.48	700.698.585	4,264.11	1,133,793,831	104	89	8,310	1,133,793,831	191	51	Dinas Perikanan
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	15	2.231.581.422	2	-	3	602.790.711	2	979.928.000	0	20.715.537	0	60.418.239	2	351.961.470	0	417.298.085	2	850.393.331	100	87	4	850.393.331	27	38	Dinas Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	10	290.721.000	-	-	10	260.000.000	10	290.721.000	0	0	0	0	0	0	11	283.400.500	11	283.400.500	110	97	11	283.400.500	110	97	Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Person	10	3.751.372.133	174.43	-	2.00	600.000.000	2.00	732.892.220	19.79	12.393.440	47.01	35.828.020	27.87	177.113.833	28.15	16.341.659	129	241.676.943	6,131	33	297	241,676,943	2,971	8	Dinas Perikanan
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Jumlah Kelompok yang dibina	Person	21.05	1.391.372.133	1.42	-	2.68	200.000.000	2	260.394.080	0	380.500	0	15.952.270	0	4.193.000	14.18	0	14	20.525.770	709	8	16	20.525.770	74	1	Dinas Perikanan
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai	Unit Usaha	65	1.391.372.133	5		10	200.000.000	10	260.394.080	0	380.500	0	15.952.270	0	4.193.000	38	0	38	20.525.770	380	8	43	20.525.770	68	1	Dinas Perikanan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)	Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2021		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi /sa	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	Perangkat Daerah											
									I	II	III	IV																
1	2	3	4	4A	5	6	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7	14=6+12	15=14/5x1	16											
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	6	2.360.000.000	10	6	400.000.000	3	472.498.140	0	12.012.940	0	19.675.750	2	173.120.833	0	16.341.650	1	221.151.173	50	47	12	221.151.173	200	9	Dinas Perikanan
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pelaku Usaha	10	2.360.000.000	10	2	400.000.000	2	472.498.140	0	12.012.940	0	19.675.750	1	173.120.833	0	16.341.650	1	221.151.173	50	47	11	221.151.173	110	9	Dinas Perikanan
		UP-T BALAI BENIH IKAN																										Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Persentase	7.14	2.410.000.000	8.53	1.5	250.000.000	1.5	274.249.090	0	47.047.249	0	50.701.402	14.49	35.669.212	63.56	53.029.852	78	186.447.715	9.293	68	87	186.447.715	1.213	8	Dinas Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi benih ikan	Ekor	40000	2.410.000.000	10.342.90	20000	250.000.000	20.000	274.249.090	0	47.047.249	0	50.701.402	21.000	35.669.212	9.000	53.029.852	30.000	186.447.715	150	68	48.342	186.447.715	121	8	Dinas Perikanan
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	1.345.000.000	95	2	250.000.000	2	274.249.090	0	47.047.249	0	50.701.402	0	35.669.212	2	53.029.852	7	186.447.715	100	68	97	186.447.715	4.880	14	Dinas Perikanan

TABEL II.5.
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2023 TRIWULAN I DAN II

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2023 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021	
									Rp (Renja)		Rp (DPA)		I		II		III		IV									
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100													
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria tan yang sesuai SOP	Persen	90	41,461,448,085	288	6,398,636,724	77	100,000,000	77	50,000,000	0	1,302,835	0	8,121,501				0	9,424,336	0	19	288	6,408,061,060	320	15	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nil ai Akuntabilit as	Predikat/N ilai Akuntabilit as	81	500,000,000	81	19,730,961	77	100,000,000	77	50,000,000	0	1,302,835	0	8,121,501				0	9,424,336	0	19	81	29,135,297	100	6	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	500,000,000	2	19,730,961	2	50,000,000	2	50,000,000	0	1,302,835	2	8,121,501				2	9,424,336	100	19	4	29,135,297	33	6	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretaria tan yang sesuai SOP	Persen	90	41,461,448,085	288	6,398,636,724	85	6,297,796,517	85	5,994,767,541	0	1,924,662,847	85	2,023,622,872				85	3,548,285,719	100	59	373	9,946,922,443	414	24	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	27,431,311,585	4	4,985,430,937	1	5,401,924,317	1	4,090,564,041	1	1,203,416,752	1	1,544,253,047				2	2,747,669,799	200	67	6	7,733,080,736	600	28	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	60	27,431,311,585	163	4,985,430,937	48	5,401,924,317	48	4,090,564,041	40	1,203,416,752	40	1,544,253,047				80	2,747,669,799	367	67	243	7,733,080,736	405	28	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	90	4,294,136,600	286	838,427,328	80	688,093,100	80	585,340,100	91.88	86,784,251	93.12	173,708,222				185	260,492,373	231	45	471	1,098,919,701	524	26	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	1,080,404,100	12	13,041,000	2	139,000,000	2	90,640,100	0	36,781,050	2	24,721,890				2	41,902,900	100	40	14	54,543,900	56	5	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	306,772,000	389	255,055,685	2	63,893,100	2	50,000,000	2	5,207,240	2	11,824,874				4	17,112,104	200	34	393	272,307,799	19,665	89	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	50	125,800,000	148	234,205,685	10	25,200,000	10	25,200,000	4	1,450,000	13	6,950,000				17	8,400,000	170	33	165	222,605,685	330	177	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Laporan	80	2,620,000,000	10.51	1,420,352,547	80	480,000,000	80	419,500,000	30	63,265,861	34	130,211,498				64	293,477,399	80	46	75	1,013,629,900	93	82	

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		
									Rp (Renja)		Rp (DPA)		I	II	III	IV										
									1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Persen	85	3,098,000,000	3	1,388,800,554	78	667,500,000	78	301,800,000	3,613,422	-	1,852,743											
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	250	998,000,000	0	31551,993	35	238,000,000	35	57,400,000	0	0	0											
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	397	1,500,000,000	20	0	20	402,500,000	20	380,400,000	0	3,613,422	0	1,852,743										
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1	25,000,000	54	1,147,746,777	1	47,000,000	1	64,000,000	0	0	0	0										
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	3,917,664,100	25	13,952,946	77	737,272,200	77	797,668,900	52.92	212,801,683	57.31	248,805,301	110	461,606,984	143	58	135	475,559,930	169	12		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	321,800,000	4,264.11	1,133,793,833	12	26,400,000	12	59,309,000	3	12,064,250	3	14,802,250	6	26,866,500	50	45	4,270	1,360,660,311	35,584	963		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	339,030,000	2	850,393,333	12	35,000,000	12	35,000,000	0	0	3	147,000	3	147,000	25	1	5	850,540,331	42	267		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40	3,476,854,300	11	283,400,500	38	695,872,200	38	723,359,900	40	200,737,433	40	233,856,061	80	434,593,484	211	60	91	717,993,984	228	23		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	80	1,982,270,800	286	838,427,328	77	405,000,000	77	219,394,500	14.19	18,046,839	17.92	55,003,559	32	73,050,398	42	33	319	911,477,726	398	46		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	991,135,400	12	13,041,000	48	390,000,000	48	175,394,500	17	17,646,839	17.00	43,403,559	34	61,050,398	71	35	46	74,091,398	115	7		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Tahun					98	35,000,000	98	24,000,000	7	400,000	25.00	11,600,000	32		33							
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	991,135,400	12	61,572,000	2	200,000,000	2	20,000,000	0	0	-	-	0	0	0	12	61,572,000	30	6			
	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Persen	4.63	11,000,000,000	137	763,814,328	0.51	400,000,000	0.51	1,050,884,000	-	62,868,680	7.13	24,432,857	7	87,361,537	1,398	8	144	851,115,865	3,113	8		
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan	Persen	22.18	5,250,000,000	8	40,850,000	18.67	250,000,000	18.67	725,000,000	0	14,134,260	77.78	8,798,250	78	22,932,510	417	3	86	63,782,510	387	1		
		Praktisanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	115	1,675,000,000	134,874.54	1,388,800,554	20	250,000,000	20	725,000,000	0	14,134,260	-	8,798,250	0	22,932,510	0	3	134.875	1,411,733,064	117,282	84		

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		
									Rp (Renja)		Rp (DPA)		I	II	III	IV										
									7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100									
1	2	3	4	4A	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11	13=12/7 x100	14=6+12	15=14/5x100											
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Persen	0	2,200,000,000	0.00	0	0	150,000,000	0	325,884,000	0	48,734,420	0	15,634,607										
		Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	1	150,000,000			1	150,000,000	1	325,884,000	0	48,734,420	0	15,634,607										
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	7.14	6,912,581,422	3	1,388,800,554	1.33	1,393,790,711	1.33	1,799,223,180	38.13	13,273,500	8.19	13,843,625		46	27,117,125	3,483	2	49	1,415,917,679	691	20	
		Pemberdayaan Pemuda Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	2,111,000,000	4	31,551,993	14	50,000,000	14	270,000,000	10	4,055,750	8	6,083,625		18	10,139,375	129	4	22	41,691,368	24	2	
		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses, Informasi, Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses, Informasi, Pengetahuan, Teknologi dan Reformasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	34	950,000,000	0		8	50,000,000	8	270,000,000	0	4,055,750	0	6,083,625		0	10,139,375	0	4	0	10,139,375	0	1	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4,342.72	4,801,581,422	20	0	4,160.68	1,343,790,711	4,160.68	1,529,223,180	657.67	9,217,750	1,390.26	7,760,000		2,048	16,977,750	49	1	2,068	16,977,750	48	0	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	35	2,231,581,422	54	1,147,746,777	3	593,790,711	3	330,000,000	0	0	0	7,760,000		0	7,760,000	0	2	54	1,155,506,777	357	52	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	2	1,680,000,000	2	221,351,173	2	750,000,000	2	1,199,223,180	0	9,217,750	0	38,748,300		0	27,966,050	0	2	2	249,117,223	100	15	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan	Persen	10	5,171,372,133	25	13,952,946	2.00	200,000,000	2.00	151,150,100	(38.03)	3,569,500	-6,293	3,569,500		-6,331	7,139,000	-316,352	5	-6,306	21,091,946	-45,900	0	
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	21.05	1,391,372,133	25	13,952,946	3.44	200,000,000	3.44	151,150,100	-40	3,569,500	190	3,569,500		150	7,139,000	4,360	5	175	21,091,946	831	2	
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	65	1,391,372,133	4,264.11	1,133,793,831	30	200,000,000	30	151,150,100	6	3,569,500	23	3,569,500		29	7,139,000	290	5	4,293	1,140,932,831	6,605	82	

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Output)	Satuan	Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode renstra PD)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2022		Target Kinerja Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 2021 yang dievaluasi (%)	Realisasi Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja Renstra PD s/d Tahun 2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Rp (Renja)		Rp (DPA)		I	II	III	IV	12=8+9+10+11		13=12/7 x100							14=6+12		15=14/5x100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									1	2	3	4	4A	5	6	7				8						9	10	11	12=8+9+10+11		13=12/7 x100		14=6+12		15=14/5x100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		UPT BALAI BENIH IKAN					123	241,676,943																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Pada Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan Dinas Perikanan memiliki indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran kinerja. Indikator kinerja yang telah ditetapkan berupa jumlah produksi perikanan (jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya) yang menjadi tolak ukur untuk mengukur keberhasilan kinerja dan nilai tukar nelayan. Pada Tahun 2022, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada capaian sasaran strategis meningkatnya ekonomi sektor perikanan dengan indikator kinerja produksi sektor perikanan tercapai sebesar 100,40% dengan jumlah 139.138,66 Ton, sedangkan produksi olahan produk perikanan sebesar 125,29% dengan jumlah 526,29 Ton.

Dalam mendukung keberhasilan kinerja Dinas Perikanan Tahun 2022, ada 3 (tiga) program yang mendukung yaitu program pengelolaan perikanan tangkap, program pengelolaan perikanan budidaya dan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dimana program tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DAK bidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta ketersediaan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

TABEL II.6.
RINCIAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PERIKANAN TAHUN 2022

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Laporan LKjIP	76 Persen	41.801.400,00	33.164.575,00	79,34
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	76 Persen	41.801.400,00	33.164.575,00	79,34
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	41.801.400,00	33.164.575,00	79,34
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan Yang Sesuai SOP	80 Persen	7.186.586.449,00	6.962.846.313,00	96,88
	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tepat Waktu	5.048.182.652,50	4.985.410.937,00	98,76
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/Bulan	5.048.182.652,50	4.985.410.937,00	98,76
	2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Administrasi Umum Perkantoran	77 Persen	979.752.473,00	885.952.363,00	90,43
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	251.069.639,00	209.198.139,00	83,32
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Tahun	24.586.450,00	24.298.000,00	98,83
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	8.488.000,00	8.286.000,00	97,62

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		yang Disediakan				
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Tahun	43.364.400,00	43.352.350,00	99,97
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	26.850.000,00	13.800.000,00	51,40
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Tahun	88.300.000,00	76.904.000,00	87,09
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 OK	537.093.984,00	510.113.874,00	94,98
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	76 Persen	881.954.554,50	838.427.328,00	95,06
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	13.141.000,00	13.041.000,00	99,24
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Tahun	99.380.276,50	61.572.000,00	61,96
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	38 Laporan	769.433.278,00	763.814.328,00	99,27
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	76 Persen	276.696.769,00	253.055.685,00	91,46
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	235.821.769,00	212.205.685,00	89,99

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	40.875.000,00	40.850.000,00	99,94
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,39 Persen	1.530.528.488	1.420.352.547	92,80
	1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat di Usahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	134.481,33 Ton	1.479.214.000	1.388.800.554	93,89
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	3 Unit	1.479.214.000	1.388.800.554	93,89
	2. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Kapasitas Nelayan Kecil	11,57 Persen	51.314.488	31.551.993	61,48
	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	51.314.488	31.551.993	61,48
III.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,50 Persen	1.495.434.806	1.333.194.493,34	89,15
	1. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	10 Kelompok	15.968.000,00	13.952.946,00	87,38
	- Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	0 Kelompok	15.968.000,00	13.952.946,00	87,38
	2. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.106.08 Ton	1.026.596.005	854.723.598	83,26
	- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	919.236.116	850.393.331,34	92,51
	- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Jenis	560.230.690	468.848.216	83,68

NO	NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (Out Come)/KEGIATAN (Out Put)	TARGET KINERJA			CAPAIAN (%)
			OUPUT/ OUTCOME	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	2 Persen	320.195.370	241.676.943	75,47
	1. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	2,68 Persen	22.701.000	20.525.770	90,41
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	38 Unit Usaha	22.701.000	20.525.770	90,41
	2. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	3 Jenis	297.494.370	221.151.173	74,33
	- Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	1 Pelaku Usaha	297.494.370	221.151.173	74,33
	JUMLAH			10.593.905.513,00	10.010.593.871,34	94,49

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase capaian atau serapan anggaran Dinas Perikanan tidak ada yang mencapai angka 100%, hal ini dikarenakan ketersediaan anggaran di daerah memfokuskan pada pembayaran hutang Tahun 2021 karena pada Tahun 2021 anggaran diprioritaskan untuk penanganan pandemi covid-19 sehingga proses penyerapan anggaran menjadi terganggu atau berkurang, yang mengakibatkan ada beberapa kegiatan pada Tahun 2022 yang tidak bisa dilaksanakan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam menyusun perencanaan strategis dibutuhkan suatu gambaran yang jelas tentang kondisi daerah agar perencanaan suatu program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan daerah tersebut. Informasi yang jelas akan memudahkan bagi organisasi untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi kendala serta solusi dalam pembangunan terutama di bidang perikanan.

Dalam mencapai keberhasilan kinerja tentunya ada beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi. Isu-isu tersebut dapat dimasukkan dalam faktor pendukung dan faktor penghambat keberhasilan kinerja serta solusi atau alternatif yang dapat diambil dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang sering muncul dalam mencapai keberhasilan kinerja yang dilakukan setiap tahunnya, tujuannya adalah untuk mendapatkan solusi serta kebijakan-kebijakan yang dapat mengurangi kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan/Faktor Penghambat

- Kurangnya armada penangkapan ikan yang memiliki tonase yang besar.
- Masih rendahnya keterampilan dan keahlian nelayan lokal.
- Penggunaan alat tangkap yang masih tradisional.
- Kurangnya ketersediaan SPDN/SPBUN di kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kabupaten.
- Belum optimalnya pengelolaan atau pemanfaatan potensi perikanan tangkap yang ada.
- Kurangnya ketersediaan pabrik es dan cold storage di kecamatan-kecamatan.
- Kurangnya keahlian bagi pelaku usaha budidaya.

- Belum adanya penerapan penggunaan benih/bibit ikan yang berstandar SNI.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan budidaya.
- Kurangnya minat pelaku usaha perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan) untuk membentuk kelompok dalam menjalankan usaha.
- Masih adanya penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan.
- Masih maraknya pelaku *illegal fishing* dari negara-negara tetangga.

2. Faktor Pendukung

- Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberian dana yang memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti :
 - Program PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan program yang sangat besar untuk membangun pelabuhan perikanan beserta seluruh fasilitas pendukung yang bersifat nasional;
 - Penetapan Kawasan Kampung Nelayan Maju (KALAJU);
 - Penetapan Kawasan Kampung Budidaya Kerapu.
- Adanya dukungan dari instansi – instansi terkait sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat berjalan baik;
- Peran Penyuluh Perikanan Bantu, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah hasil perikanan. Aktifitas para penyuluh yang sehari-hari mendampingi masyarakat di lapangan sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. Selain pendampingan usaha, para penyuluh juga mendampingi masyarakat dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha.
- Besarnya potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Natuna.

3. Solusi/Alternatif Yang Dapat Dilakukan

- Perlunya armada penangkapan ikan dengan kapasitas tonase yang besar.
- Perlunya pelatihan keahlian dan keterampilan bagi nelayan lokal sehingga dapat bersaing dengan nelayan dari luar.
- Perlu adanya modernisasi alat tangkap untuk nelayan tradisional.
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberantas pelaku *illegal fishing*.
- Penataan kelembagaan dan pendataan potensi perikanan yang ada.
- Mengadakan pelatihan CBIB bagi pembudidaya ikan.
- Perlunya pelatihan atau bimtek manajemen usaha bagi nelayan, pembudidaya dan pengolahan.
- Meningkatkan keterampilan SDM, baik nelayan, pembudidaya, pengolahan, penyuluh dan ASN yang membidangi perikanan.
- Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada Kelompok
- Melaksanakan bimbingan teknis penerapan cara pengolahan ikan yang baik bagi UMKM/Pengolah Hasil Perikanan melalui kegiatan peningkatan mutu nilai tambah dan diversifikasi usaha.
- Fasilitasi pameran produk olahan hasil perikanan ke luar daerah untuk mempromosikan ragam dan jenis produk olahan unggulan perikanan Kabupaten Natuna.
- Bimbingan teknis pemasaran produk olahan hasil perikanan berbasis online marketplace atau website online.
- Sosialisasi dan Fasilitasi Perizinan Usaha baik perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mengacu pada

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan RPJMD. Renja Tahun 2023 secara umum telah sesuai dengan anggaran yang disediakan, karena penyusunannya berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021 – 2026 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD sudah selaras dan anggarannya telah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perikanan yang telah ditetapkan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, terutama partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain kelembagaan yang ada di masyarakat, pemuda dan tokoh masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didiskusikan kembali di Dinas Perikanan Kabupaten Natuna untuk menentukan program dan kegiatan prioritas yang akan diusulkan. Pembahasan juga dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2023 dilakukan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024 sesuai dengan misi Presiden yang termasuk dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan terutama bidang kelautan dan perikanan yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Selain mengacu pada RPJMN, pembangunan bidang kelautan dan perikanan harus diselaraskan dengan Renstra Perubahan Kementerian dan Kelautan Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024. Dimana dalam mencapai salah satu agenda pembangunan Presiden yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi **Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**. Dalam mencapai visi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai misi :

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Peningkatan Kualitas RB di KKP

Untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Optimalnya pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP
- b. Optimalnya pengelolaan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan KKP

Dilihat dari kebijakan nasional dalam pembangunan yang telah ditetapkan, serta Renstra Perubahan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2021 – 2024, maka Rencana Kerja Dinas Perikanan dapat diselaraskan terutama untuk menunjang visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang salah satunya memiliki tujuan untuk mengoptimalkana pengelolaan ruang laut, pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, budidaya, yang terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatnya daya saing, pengendalian mutu hasil KP, keamanan hayati ikan dan meningkatnya pengawasan pengelolaan SDKP, yang berkaitan dengan target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yaitu jumlah produksi perikanan yang terdiri dari jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta jumlah produksi olahan produk perikanan yang harus dicapai setiap tahunnya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu). Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan analisis permasalahan dan isu strategis Dinas Perikanan serta Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Natuna, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun yang telah direncanakan.

Dalam meningkatkan ekonomi sektor perikanan, target yang telah ditetapkan Dinas Perikanan pada Tahun 2023 dengan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.1
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah	Meningkatnya Ekonomi Sektor Perikanan	Produksi Sektor Perikanan (Ton)	(Ton)	140.921,59
		Produksi Olahan Produk Perikanan (Ton)	(Ton)	435,81
Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Predikat/ Nilai	BB/78
Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,49

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Program merupakan kumpulan kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 yaitu ***Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural*** yang dijabarkan dalam beberapa misi, Dinas Perikanan bertanggungjawab secara langsung untuk mencapai misi kedua yaitu ***Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal dengan tujuan Meningkatkan perekonomian di sektor Pertanian dan Perikanan.***

Oleh karena itu, penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perikanan Kabupten Natuna Tahun 2023 dilakukan dengan menjabarkan visi, misi dan arah kebijakan Bupati Natuna ke dalam serangkaian rencana tindakan yang akan diimplementasikan untuk mencapai kondisi yang akan dicapai pada akhir tahun perencanaan dengan memperhatikan kondisi sumberdaya perikanan saat ini. Sedangkan pelaksanaan untuk mencapai sasaran adalah melalui

program, kegiatan dan sub kegiatan kegiatan yang telah disesuaikan dengan aturan yang berlaku yaitu Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana yang terurai dibawah ini.

➤ **Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Tahun 2023**

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan :

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Kegiatan :

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Penyediaan Bahan/Material;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan :

- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Kegiatan :

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan:

1. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.

Kegiatan :

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.

III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan :

- a. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil.

Kegiatan :

- b. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

IV. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Kegiatan :

- a. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Sub Kegiatan:

1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

Kegiatan :

- b. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

1. Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah menyusun kebutuhan anggaran guna mendukung capaian kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2023. Adapun kebutuhan anggaran Tahun 2023 yang telah disusun dapat dilihat pada tabel matrik Renja Dinas Perikanan Tahun 2023 dibawah ini.

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2024	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH	KONTRIBUSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB	Persen	30.81	31 ,23	5,578,790,711
2.1.1.1.1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI OLAHAN PRODUK PERIKANAN (TON)	Ton	410.69	435.81	1 22379071 1
2.1.1.1.1.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI OLAHAN PERIKANAN	Persen	174.43	2.00	1 22379071 1
2.1.1.1.1.06.2.01.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Ikan yang memiliki TDU-PHP	Unit	5	3	150,000,000
2.1.1.1.1.06.2.01.01.	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	0	1	150,000,000
2.1.1.1.1.06.2.02.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Peningkatan Jumlah UPI yang dibina	Persen	1.42	4.21	323,790,711
2.1.1.1.1.06.2.02.01.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	5	15	323,790,711
2.1.1.1.1.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis bahan baku industri pengolahan ikan	Jenis	10	6	750,000,000
2.1.1.1.1.06.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	5.332,22	5.705,40	250,000,000

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2024	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1. 06.2.03 .02.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha	10	2	500,000,000
2.1.1.1.1. .1.	MENINGKATNYA EKONOMI SEKTOR PERIKANAN	PRODUKSI SEKTOR PERIKANAN (TON)	Ton	1 36.678,02	1 40.921 ,59	4,355,000,000
2.1.1.1.1. .1.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	Persen	9.99	1.13	2,500,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	132.632,62	136.700,23	750,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.01.03.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	4	3	750,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kapasitas Nelayan Kecil	Persen	37.78	20.94	1,175,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	135	35	450,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	160	25	375,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha	47	10	350,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.03.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terlaksananya Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan	Unit	0	0	575,000,000
2.1.1.1.1. 03.2.03.01.	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen	0	0	-
2.1.1.1.1. 03.2.03.02.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	0	1	575,000,000
2.1.1.1.1. .1.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	Persen	8.53	1,46	1,855,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok budidaya yang terbina	Kelompok	93	21	675,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	44	7	250,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.02.03.	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	4	6	175,000,000

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2024	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1.1.1. 04.2.02.0 4.	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	45	8	250,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4.045,40	4.221,36	1,180,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.04.0 1.	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	220,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.04.0 2.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	3	480,000,000
2.1.1.1.1. 04.2.04.0 3.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	480,000,000
6.1.1.1.1. 1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	Nilai	75.67	78	100,000,000
6.1.1.1. 1.	MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI LAKIP	Nilai/Predika t	75.67	78.00	100,000,000
6.1.1.1. 1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJIP	Nilai	75.67	78	100,000,000
6.1.1.1.1. 01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Persen	75.67	78	100,000,000
6.1.1.1.1. 01.2.01.0 6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	100,000,000
6.1.1.1.2.	TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	Indeks	3.44	4.5	8,292,289,617
6.1.1.1.2.1.	MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	Indeks	3.46	3.48	8,292,289,617
6.1.1.1.2.1. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	Persen	80	85	8,292,289,617
6.1.1.2.1. 01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tepat Waktu	1	1	5,544,924,317
6.1.1.2.1. 01.2.02.0 1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40	55	5,544,924,317
6.1.1.2.1. 01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bersertifikasi	Persen	84	89	206,400,000
6.1.1.2.1. 01.2.05.0 9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	26	6	103,200,000

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2024	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1.2.1. 01.2.05.1 1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	26	6	103,200,000
6.1.1.2.1. 01.2.05. 2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	Persen	95	95	100,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.05.0 2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	1	100,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.06. 2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	Persen	75	85	708,093,100
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	2	119,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	0	-
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	-
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2	63,893,100
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	10	10	25,200,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	0	-
6.1.1.2.1. 01.2.06.0 9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	80	480,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.06.1 0.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	30	20,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07. 2.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	Persen	75	80	742,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	38	2	75,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 5.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	290	15	262,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	117	20	380,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 7.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	0	-
6.1.1.2.1. 01.2.07.0 8.	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	1	25,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.08. 1.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	78	737,872,200
6.1.1.2.1. 01.2.08.0 1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	0	12	27,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.08.0 2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	15,000,000

Kode	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 2024	
					Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7
6.1.1.2.1. 01.2.08.0 4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	38	40	695,872,200
6.1.1.2.1. 01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	Persen	75	78	253,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.0 2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	48	190,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.0 6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	98	15,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.0 9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	48,000,000
6.1.1.2.1. 01.2.09.1 1.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	10	-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas Dinas Perikanan yang bermanfaat guna mendukung pencapaian visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pajabat administrator, pengawas dan fungsional di Dinas Perikanan agar dapat mengawal pelaksanaan Renja Tahun 2023 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja Tahun 2024 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Perikanan diharapkan dapat berperan aktif dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2024 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Adanya Renja Dinas Perikanan Tahun 2024, maka penetapan

prioritas pembangunan pada urusan pemerintahan pilihan bidang perikanan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2024 dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang telah ditetapkan yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.